



RENJA POKOK 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)**

KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Pokok Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Renja adalah Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk periode 1 tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM, yang disusun berpedoman kepada Renstra BKPSDM dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Melalui penyusunan Ranwal Renja ini sangat diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur dalam rangka peningkatan kinerja BKPSDM serta dapat menjadi sebuah umpan balik dalam penetapan Keputusan dan kebijakan dalam penyusunan perencanaan oleh pimpinan dan seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Luwu Timur dimasa yang akan datang.

Semoga penyusunan ranwal Renja Ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi suatu pedoman dalam penyusunan perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi BKPSDM dalam rangka upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 05 September 2024

Kepala BKPSDM,

Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 198602 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	22
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur	47
BAB IV PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2024 Kab. Luwu Timur	8
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM	20
Tabel 2.2.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM	21
Tabel 2.2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM	22
Tabel 2.2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	25
Tabel 2.2.5	Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	25
Tabel 2.2.6	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	26
Tabel 2.2.7	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Jabatan Struktural	26
Tabel 2.2.8	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Jabatan Fungsional.....	27
Tabel 2.4.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2025 BKPSDM.....	30
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025	43
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2025.....	44

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Tahun 2024	24
-----------	---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (BKPSDM) diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan tetap memperhatikan sumber daya manusia yang tersedia.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan Daerah.

Dalam undang-undang ini mengharuskan untuk setiap Daerah untuk Menyusun perencanaan pembangunan jangka Panjang yang disingkat (RPJP) untuk periode 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 Tahun serta Rencana Kerja (RENJA) untuk periode 1 Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra OPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja OPD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Rensta OPD dan RPJMD. Renja OPD disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Belanja Penapatan Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4); dan
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan,
2. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BKPSDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BKPSDM untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2025.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kab. Luwu Timur Tahun 2025.
5. Sebagai acuan BKPSDM dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPSDM;
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
7. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
8. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, Proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kerja Pelayanan BKPSDM

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/ kegiatan dan sekaligus merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Laporan kinerja dapat dilihat dari 2 (Dua) hal yaitu **pencapaian kinerja output** dan **kinerja keuangannya**.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Kegiatan evaluasi capaian hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia adalah merupakan sebuah cara

untuk mengidentifikasi kemampuan BKPSDM dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Gambaran Pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan memenuhi target secara maksimal ataupun tidak dapat tergambarkan melalui laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagai upaya dalam memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan tahun 2025 sangat perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.856,106,991,- atau sebesar 96,10% dari anggaran sebesar Rp11,296,528,798,-. Dan pada Tahun 2024 Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II 2024 sebesar Rp5.615.312.405,- atau tercapai sebesar 46,93% dari anggaran pokok sebesar Rp11.964.329.798,-.

Adapun Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Luwu Timur

Nama SKPD: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lembar:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun (n-3))	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan 2024 (Renja SKPD) Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2023 (Tahun n- 2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (Tahun n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/6) \times 100$	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = (10/4) \times 100$
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	43,57%	43,57%

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	7 Dok	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dok	3 Dok	30%
5.03.01.2.01.00002	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dok	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dok	-	0%
5.03.01.2.01.00004	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dok	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dok	-	0%
5.03.01.2.01.00007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dok	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dok	8 Dok	57,14%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	95%	96,43%	98,21%	98,21%	103,38%	95%	75,31%	79,28%
5.03.01.2.02.00001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	37 Orang	26 Orang	28 Orang	27 Orang	96,43%	32 Orang	29 Orang	90,63%
5.03.01.2.02.00007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	7 Dokumen	13 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Dok	3 Dok	60%
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Dok	2 Dok	50%
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63,39%	63,39%
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan (Stel)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI	5 Orang	9 Orang	9 Orang	9 Orang	100%	7 Orang	4 Orang	57,14%
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	-	6 Orang	6 Orang	-	4 Orang	0 Orang	0%

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	5 Orang	10 Orang	14 Orang	14 Orang	100%	14 Orang	10 Orang	71,43%
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	95%	100%	100%	100%	105,26%	100%	73,21%	73,21%
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	7 Jenis	7 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	13 Jenis	12 Jenis	92,31%
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 Unit	19 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	100%	15 Jenis	14 Jenis	93,33%
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	21 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	100%	30 Jenis	30 Jenis	100%
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Eksamplar	48 Eksamplar	48 Eksamplar	48 Eksamplar	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	650 Orang		775 Orang	775 Orang	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	140 Kali	341 Kali	297 Kali	297 Kali	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
5.03.01.2.06.0010	Penata usaha arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dok	2 Dok	50%
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	99,39%	99,39%
5.03.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
5.03.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	19 Unit	18 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	55 Unit	54 Unit	98,18%

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 Unit	31 Unit	28 Unit	28 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	90,96%	100 %	90,96%	90,96%	100%	50%	50%
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2000 Surat	1092 Surat	2000 Surat	1484 Surat	74,20%	12 Laporan	6 Laporan	50%
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening	28 Rekening	27 Rekening	27 Rekening	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	85,20%	85,20%

	Pemerintahan Daerah	pemerintahan yang terpelihara dengan baik								
5.03.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan terbayarkan Pajaknya	2 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
5.03.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
5.03.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	55 Unit	45 Unit	73 Unit	73 Unit	100%	76 Unit	22 Unit	28,95%
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilita	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	-	0%

		si								
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase informasi pegawai yang responsif gender	95%	100,28 %	95 %	115,43%	105,56%	95%	62,50%	65,79%
5.03.02.2.01.2	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun	2.220 Formasi	4820 Formasi	1733 Formasi	1733 Formasi	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5.03.02.2.01.3	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Usulan Calon PNS dan PPPK yang akan diterima	600 Orang	875 Orang	671 Orang	715 Orang	106,56%	2 Dok	1 Dok	50%
5.03.02.2.01.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pelayanan Pemberhentian ASN tepat waktu	100 Persen	87 Orang	78 Orang	109 Orang	139,74%	12 Dok	6 Dok	50%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi	5 Aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%

	Kepegawaian	kepegawaian yang dikelola (Aplikasi)								
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah ASN yang diolah data kepegawaiannya melalui My SAPK	100 Persen	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase rata-rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	95%	93,13 %	71%	99,87%	140,66%	95%	50%	52,63%
5.03.02.2.02.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak masuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	78,93 Persen	32,91 Persen	20%	23,35%	96,79%	4 Dok	2 Dok	50%
5.03.02.2.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang terbit	100 Persen	93,50 Persen	98%	98,04%	100,04%	6 Dok	3 Dok	50%
5.03.02.2.02.3	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase jumlah Pejabat ASN Daerah	99 Persen	94,54 Persen	95%	94,71%	99,70%	4 Dok	2 Dok	50%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase rata-rata capaian pengembangan kompetensi ASN	95%	99,42 Persen	62%	91,44%	147,49%	95%	49,00%	51,58%

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.03.02.2.03.2	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Assessment	95 Persen	15,08 Persen	37%	27,64%	74,72%	2 Dok	1 Dok	50%
5.03.02.2.03.4	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	10 Orang	33 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	4 Orang	80%
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	88,82 Persen	68,91 Persen	50%	49,81%	99,61%	100 Orang	17 Orang	17%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase rata-rata capaian penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	95%	87,35 Persen	95%	109,86%	115,64%	95%	45,71%	48,12%
5.03.02.2.04.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100 Persen	100 Persen	100%	99,73%	99,73%	4 Dok	3 Dok	50%
5.03.02.2.04.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi	Persentase jumlah piagam penghargaan pegawai yang terbit	100 Persen	94,46 Persen	100%	93,33%	93,33%	84 Orang	0 Orang	0%

	Pegawai									
5.03.02.2.04.7	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Jumlah kasus Disiplin ASN yang tertangani	100 Persen	94,67 Persen	95 %	100%	105,26%	7 Orang	9 Orang	128,57 %
5.03.02.2.04.9	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Persentase jumlah permohonan proses izin perceraian pegawai yang terlayani	75 Persen	51,85 Persen	75%	100%	133,33%	2 Laporan	1 Laporan	50%
5.03.02.2.04.10	Evaluasi disiplin ASN	persentase pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan	100 Persen	95,77 Persen	85%	100%	117,65%	1 Laporan	0 Laporan	0%
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Jumlah ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis melalui BKPSDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79,17%	79,17%

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5.04.02.2.01.3	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM	244 Orang	174 Orang	275 Orang	275 Orang	100%	260 Orang	195 Orang	75%
5.04.02.2.01.4	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM	5 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	6 Dokumen	5 Dokumen	83,33%

	Pemerintahan Umum									
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	95%	99,61 Persen	95 %	32,92%	34,65%	100%	33,84%	33,84%
5.04.02.2.02.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur	4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	9 Dok	5 Dok	55,56%

5.04.02.2.02.3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Jumlah kegiatan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan (kali)	2 Kali							
5.04.02.2.02.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Persen)	99 Persen	74,41 Persen	75%	67,53%	90,05%	3 Dokumen	-	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bisnis proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 telah ditetapkan sesuai periode Renstra. Berdasarkan Renstra 2021 – 2026 , BKPSDM Kabupaten Luwu Timur mempunyai 3 (Tiga) Indikator dengan pencapaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	%	99.85	99,88	99,90	99,95	99,99	100	100
Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	79.13	80,61	81,82	82,10	83,50	85,00	85,00
Nilai SAKIP	%	70	70	71	72	77	80	100

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin terealisasi sebesar 99,78% dari target sebesar 99,95%. Dari 5.101 orang ASN Kabupaten Luwu Timur sampai dengan 31 Desember 2023 11 orang ASN yang dijatuhi hukuman disiplin terkait kasus tidak disiplin masuk kerja. 4 orang diantaranya telah ditetapkan penjatuhan hukuman disiplinnya sedangkan 7 orang lainnya masih dalam proses penjatuhan hukuman disiplin. Artinya selama periode tahun 2023 terdapat 5.090 orang ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin. Sehingga capaian IKU 1 ini tercapai sebesar 99,83%.

- 2) Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan fungsional terealisasi sebesar 76,38% dari target sebesar 82,10%. Jumlah ASN Kabupaten Luwu Timur sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 5.101 orang dan berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa terdapat 3.896 orang ASN telah memiliki sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan Fungsional. Sehingga capaian Kinerja untuk IKU 2 ini tercapai sebesar 93,03%. Capaian realisasi ini masih rendah dikarenakan peningkatan jumlah ASN yang signifikan yang berasal dari tenaga PPPK sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.306 orang.
- 3) Nilai SAKIP BKPSDM pada tahun 2023 adalah sebesar 80,35 atau dengan kata lain telah memperoleh predikat A. Nilai SAKIP BKPSDM ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai sebesar 75,95.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II 2024 sebagai berikut:

1. Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin terealisasi sebesar 99,94% dari target sebesar 99,99%. Dari 5.327 orang ASN Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terdapat 3 orang ASN yang dijatuhi hukuman disiplin terkait kasus tidak disiplin masuk kerja. Artinya terdapat 5.324 orang ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin. Sehingga capaian IKU 1 ini terealisasi sebesar 99,95%.
2. Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan fungsional terealisasi sebesar 68,18% dari target sebesar 83,50%. Jumlah ASN Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 5.317 orang dan berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa terdapat 3.632 orang ASN telah memiliki sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan Fungsional. Sehingga capaian Kinerja untuk IKU 2 ini tercapai sebesar 74,89%. Capaian ini menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat penambahan jumlah Pegawai yakni PPPK sebanyak 711 orang, serta terdapat beberapa Pegawai yang pensiun dan meninggal dunia.
3. Nilai SAKIP BKPSDM sampai dengan triwulan II belum dapat diketahui dikarenakan penilaiannya dilakukan setiap setahun sekali. Dan untuk periode tahun 2024 akan dinilai pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2025.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, disajikan pada Tabel berikut ini ;

Tabel 2.2.2
Indikator kinerja kunci (IKK) berdasarkan PERMENDAGRI 86 Tahun 2017

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Data Awal (2021)	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	20 Jam	20 Jam	20 Jam	20 Jam	20 Jam	20 Jam	20 Jam
Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,26%	13,23%	20,49%	27,73%	34,88%	35,00%	35,00%
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	4,07%	10,55%	24,74%	38,82%	52,66%	53,00%	53,00%
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	Jabatan	33 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan	Jabatan	787 Orang	750 Orang	700 Orang	700 Orang	600 Orang	500 Orang	500 Orang
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2800 Orang	3300 Orang	3450 Orang	3600 Orang	3750 Orang	3900 Orang	3900 Orang

Capaian IKK tahun 2023 yaitu:

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dengan target 20 Jam terealisasi sebanyak 11 jam dalam setahun. Rendahnya realisasi ini salah satunya disebabkan karena pelaksanaan Surat Edaran Bupati Nomor: 800/405/XI/BKKPD tentang pelaksanaan Diklat Satu Pintu yang belum dipatuhi oleh setiap OPD Lingkup Kabupaten Luwu Timur sehingga data ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh OPD tidak dapat diketahui oleh BKPSDM. Selain itu, yang menjadi penyebab menurunnya realisasi ini dikarenakan kurangnya dukungan anggaran pelatihan sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan menjadi terbatas.
2. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal terealisasi sebesar 6,14% dari target sebesar 20,49% atau tercapai sebesar 29,96%. Jumlah ASN Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebanyak 5.101 orang pegawai dan diketahui terdapat 313 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal selama periode tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut

- a) Diklat Penyusunan RPJPD Periode 2025-2045 sebanyak 60 orang peserta;
 - b) Diklat Contraceptive Technique Update (CTU) sebanyak 40 orang peserta;
 - c) Diklat pengendalian Penyakit Hewan Menular bagi Petugas sebanyak 30 orang peserta;
 - d) Diklat Emotional Spiritual Question (ESQ) sebanyak 63 orang peserta;
 - e) diklat Master of Ceremony (MC) sebanyak 82 orang peserta;
 - f) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 3 orang peserta;
 - g) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) sebanyak 5 orang peserta, dan
 - h) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 30 orang peserta
3. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural terealisasi sebesar 9,34% dari target sebesar 24,74% atau tercapai sebesar 37,74%. Jumlah pejabat Struktural Kabupaten Luwu Timur sampai dengan 31 Desember 2023 diketahui sebanyak 407 orang dan pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural selama periode tahun 2023 yaitu sebanyak 38 orang dengan rincian 3 orang mengikuti diklat PKA, 5 orang mengikuti diklat PKN dan 30 orang mengikuti diklat PKP.
 4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan terisi sebanyak 32 orang dari target 35 orang atau terealisasi sebesar 91,43%. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur Per 31 Desember 2023 terisi 32 org, jabatan yg lowong 3 jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan (mutasi setelah lulus Selter JPT dilingkungan pemprov Sulsel), Kepala BPBD (pensiun krn meninggal dunia) dan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan (pensiun dini). Rencana pelaksanaan Jobfit sebagai upaya pengisian jabatan lowong tersebut tidak terlaksana pada tahun 2023 karena adanya surat edaran yang tidak memperbolehkan mutasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Masa Kerja yang belum cukup 2 tahun, sehingga Pelaksanaan Jobit akan dilakukan pada tahun 2024.
 5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan terealisasi sebanyak 937 orang pegawai dari target 700 orang atau tercapai sebesar 133,86%. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan dikarenakan beberapa pejabat fungsional dilantik ke jabatan administrator dan pengawas serta ada juga pegawai yang beralih dari jabatan fungsional menjadi jabatan pelaksana.
 6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah terealisasi sebanyak 2.826 orang dari target 3.450 orang atau tercapai sebesar 81,91%. Realisasi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.936 orang, artinya Terdapat penurunan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sebanyak 110 orang.

Jumlah ini menurun dikarenakan terdapat beberapa pejabat fungsional yang dilantik menjadi pejabat struktural, terdapat pejabat yang pensiun BUP dan meninggal dunia serta terdapat juga pejabat fungsional yang beralih ke jabatan pelaksana.

Tabel 2.2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1) s.d TW.III	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin			99,95%	99,99%	100%	100%	99,78 %	99,94%	99,99%	99,99%	
2	Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			82,10%	83,50%	85%	85%	76,38%	62,53%	85%	85%	
3	Nilai SAKIP			72	77	80	80,5	80,35	-	80,45	80,50	

Kedudukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang dibidang pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penempatan pegawai, perumusan dan pengembangan aparatur serta tugas pembantuan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan kepegawaian;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang mutasi dan data pegawai;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur. Susunan organisasi tersebut terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja, dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin; dan
 3. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
- d. Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir, terdiri atas :
 1. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Mutasi dan Promosi;
 2. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Kepangkatan; dan
 3. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Pengembangan Karir.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur,
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1



Berjalannya organisasi BKPSDM sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, saat ini sampai dengan Triwulan III tahun 2024 BKPSDM didukung oleh ASN sebanyak 29 orang (PNS sebanyak 25 orang dan PPPK sebanyak 4 orang) dan 16 orang Tenaga Upah Jasa dengan profil demografi disajikan pada tabel 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6 dan 2.2.7; dan 2.2.11

Tabel 2.2.4
Jumlah ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Badan	1						1
2	Sekretariat	1	6		2			9
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1	2					3
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir		5	1	1			7
5	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja Dan Informasi Kepegawaian		8		1			9
Jumlah		3	21	1	4			29

Tabel 2.2.5
Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Badan							
2	Sekretariat		2	1	5	1		9
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur		2					2
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir		3					3
5	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja Dan Informasi Kepegawaian		2					2
Jumlah			9	1	5	1		16

Tabel 2.2.6
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Unit Kerja	Pangkat/Golongan					
		IV	III	II	I	IX	Jumlah
1	Kepala Badan	1					1
2	Sekretariat	2	3	2		2	9
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1	2				3
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir		7				7
5	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja Dan Informasi Kepegawaian	1	5	1		2	9
Jumlah		5	17	3		4	29

Tabel 2.2.7
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Unit Kerja	Jabatan Struktural					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	Staf PNS	Staf PTT
1	Kepala Badan	1					
2	Sekretariat		1		2		
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur			1			
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir			1			
5	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja Dan Informasi Kepegawaian			1			
Jumlah		1	1	3	2		7

Tabel 2.2.8
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Unit Kerja	Pangkat/Golongan						Jumlah
		III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	PPPK	
1	Kepala Badan							
2	Sekretariat	1					2	3
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur							
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir	1	1	1	1			4
5	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja Dan Informasi Kepegawaian	1		2			2	5
Jumlah		3	1	3	1			12

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021 pada pasal 4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur yaitu:

- a) **Tugas** Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu Timur yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- b) **Fungsi** Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu Timur:
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian, kinerja dan informasi kepegawaian;
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan dan pengembangan karir;
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
 - d. Pelayanan Administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM sudah menjadi suatu hal yang sangat mendasar ketika dihadapkan dengan Isu-isu Strategis yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Sehingga dianggap perlu untuk segera ditindak lanjuti dalam mencari solusi penyelesaiannya agar dapat segera dimanfaatkan secara optimal. Beberapa Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya moratorium jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional sehingga muncul beberapa masalah terkait jabatan fungsional;
2. Aparatur sipil negara ditengarai masih belum kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik;
3. Aparatur sipil negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi);
4. Aparatur Sipil Negara yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas, fungsi jabatan yang diduduki (mismatch).
5. Aparatur Sipil Negara yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (under employment).
6. Tidak tersedianya bezetting pegawai seluruh OPD yang terupdate secara berkala.
7. Keterbatasan SDM pelayanan kepegawaian;
8. Berkurangnya jumlah pegawai setiap tahunnya karena pensiun;
9. Keterbatasan rekrutmen CPNS setiap tahunnya;
10. Data base kediklatan yang belum memadai;
11. Terbatasnya kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;
12. Belum tersedianya data kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat
13. Belum optimalnya implementasi undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Belum optimalnya implementasi peraturan pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Aparatur sipil negara;
15. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara;

16. Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil;
17. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai amanat peraturan pemerintah No 11 tahun 2009 tentang manajemen pegawai;
18. Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 yang dimuktahirkan oleh kapmen 050-3708 Tahun 2020;
19. Penerimaan ASN (CPNS dan PPPK) adalah kewenangan pusat sehingga pelaksanaannya tetap mengacu pada jadwal yang ditetapkan oleh menpan.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan BKPSDM kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penunjang pelaksana pemerintah kabupaten di bidang kepegawaian ASN daerah Kabupaten Luwu Timur, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM terdapat beberapa hal tantangan yang dihadapi BKPSDM dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tentang yang dihadapi:

1. Rendahnya tingkat kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara
2. Kurangnya disiplin Aparatur Sipil Negara
3. Belum maksimalnya pelayanan kepegawaian
4. Minimnya kegiatan diklat teknis dan struktural yang dilaksanakan
5. Kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara terhadap tugas dan tanggung jawabnya
6. Kurangnya partisipasi Aparatur Sipil Negara dalam melengkapi data kepegawaian

Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian pada ASN;
2. Diterapkannya peraturan pemerintah tentang ASN;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara melalui Pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis, dan pelatihan manajerial;
4. Terbukanya kesempatan mengikuti Pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada; dan
5. Mengoptimalkan sistem pengolahan data, akses dan informasi serta komunikasi jaringan elektronik untuk keperluan manajemen kepegawaian.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya yang tentunya tetap berpedoman pada Dokumen Renstra (Rencana Strategis) yang telah direncanakan. Sehingga setiap sub kegiatan yang dituangkan ke dalam renja awal berdasarkan sub kegiatan yang ada di dalam Dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	99%	6.516.733.148	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	99%	6.517.827.148	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%	270.073.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%	270.073.500	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	86.128.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	86.128.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.612.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.612.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	13.222.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	13.222.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	153.111.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	153.111.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	95%	3.898.064.298	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	95%	3.899.158.298	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	3.740.573.298	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	3.741.667.298	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	157.491.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	157.491.000	

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termantafkan	100%	13.824.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termantafkan	100%	13.824.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	13.824.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	13.824.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	100%	314.335.350	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	100%	314.335.350	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	84.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	84.600.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	50.955.350	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	50.955.350	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	66.740.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	66.740.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	22.200.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	22.200.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	89.840.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	89.840.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	598.759.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	95%	598.759.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	10.959.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	10.959.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	25.368.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	25.368.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	33.034.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	33.034.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	41.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	41.400.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Laporan	5.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Laporan	5.100.000	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	66.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	66.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	406.527.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	406.527.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	10.371.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	10.371.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100%	1.015.966.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100%	1.015.966.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	23.466.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	23.466.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	33.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	33.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	959.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	959.500.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	231.117.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	231.117.000	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.117.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.117.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	87.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	87.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	114.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	114.000.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	174.594.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	174.594.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	55.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	55.750.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	30.926.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	30.926.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	53.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	53.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.818.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.818.000	
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	99%	3.352.974.650	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	100%	3.352.974.650	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaian	95%	820.259.650	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaian	95%	820.259.650	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	82.420.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	82.420.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	526.337.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	526.337.000	

	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	105.034.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	105.034.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	106.468.650	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	106.468.650	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	95%	959.065.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	95%	959.065.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	207.707.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	207.707.000	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	313.964.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	313.964.000	
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	437.394.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	437.394.000	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	95%	1.199.439.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	95%	1.199.439.000	

	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	726.694.000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	726.694.000	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	385.162.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	385.162.000	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100 Orang	87.583.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100 Orang	87.583.000	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	95%	374.211.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	95%	374.211.000	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	112.241.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	112.241.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	84 Orang	110.774.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	84 Orang	110.774.000	
	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	7 Orang	81.631.000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	7 Orang	81.631.000	

	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	2 Dokumen	16.248.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	75	16.248.000	
	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Dokumen	53.317.000	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	100	53.317.000	
I I I	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang lulus dan meningkatkan kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat minimal 20JP	50%	3.540.004.500	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang lulus dan meningkatkan kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat minimal 20JP	40%	3.538.910.500	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensi teknisnya	100%	2.048.812.500	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensi teknisnya	100%	2.047.718.500	
	Penyelenggaraan, pengembangan Kompetensi teknis umum, Inti dan pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	260	1.877.912.000	Penyelenggaraan, pengembangan Kompetensi teknis umum, Inti dan pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200	1.876.818.000	

	Pembinaan Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara, Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	6 Dokumen	170.900.500	Pembinaan Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara, Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3	170.900.500	
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	100%	1.491.192.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	95%	1.491.192.000	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan	9 Dokumen	19.410.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan	4	19.410.000	

	Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun			ngan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Dokumen	1.471.782.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	96	1.471.782.000	
	Jumlah				13.409.712.298	Jumlah				13.409.712.298	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur

Kebijakan Nasional mengarah kepada Reformasi Birokrasi secara sistemik yang mencakup perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan hingga sumber daya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga pola pikir serta kultur birokrasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Program nasional yang dilaksanakan BKPSDM Kab. Luwu Timur yang termasuk dalam urusan wajib peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu melaksanakan pembangunan tata pemerintahan yang baik melalui kualitas SDM yang kemudian melahirkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas BKPSDM Kab. Luwu Timur yaitu memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka salah satu yang menjadi tujuan dari rencana kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur tahun 2024 selain meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah juga meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur. Untuk merealisasikan hal tersebut maka sangat perlu dilakukan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi ASN karena pengembangan kompetensi ASN merupakan bagian penting dalam Reformasi Birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, BKPSDM menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan yakni :

"Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkualitas"

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas, maka sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di jabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah;
2. Meningkatkan disiplin aparatur;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur;

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja (Persen)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Indeks Profesional ASN	1 Meningkatkan Disiplin Aparatur	1 Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%
			2 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	2 Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	85,00%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP BKPSDM	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	80

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BKPSDM Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan 2 Rumusan yaitu Berdasarkan PERMENDAGRI 13 Tahun 2016 dan Berdasarkan Pemetaan PERMENDAGRI 90 Tahun 2019.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2025 Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2016 menguraikan dalam 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp10.706.956.798,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp5.165.549.648,-
2. Program Kepegawaian Daerah Rp2.767.016.650,-
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp2.774.390.500,-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Luwu Timur 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan Bidang / Urusan Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan	Loka si Outp ut Kegia tan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana
						Progr am	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegia tan				Tol ak Uk ur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	3					KEPEGAWAIAN								
5	3	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				5.165.54 9.648			100%	5.092.86 8.000
5	3	1	2. 01			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah				205.541. 500			100%	71.000.0 00
5	3	1	2. 01	1	Penyusunan dokumen perencanaan		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Kab. Luwu Timur,	10 Dok	80.560.0 00	Penda patan Asli		3 Dok 40.000.0 00

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

					prangkat daerah				Malili, Punca k Indah					Daerah (PAD)				
5	3	1	2. 01	2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		2 Dokum en		17.872.5 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)			2 Dok	3.000.00 0
5	3	1	2. 01	4	Kordinasi dan penyusunan DPA- SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		2 Dokum en		13.222.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)			2 Dok	3.000.00 0
5	3	1	2. 01	7	Evaluasi kinerja prangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		14 Lapora n		93.887.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)			10 Dok	25.000.0 00
5	3	1	2. 02		Administrasi keuangan perangkat daerah						95%		3.808.05 6.298				95%	4.052.51 8.000
5	3	1	2. 02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan		Jumlah orang yang menerima gaji dan		Kab. Luwu		32 Orang/		3.696.76 9.298	Penda patan			39 Orang	4.007.51 8.000

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

					ASN		tunjangan ASN		Timur, Malili, Punca k Indah		bulan			Asli Daerah (PAD)				
5	3	1	2.	7	Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/ semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/s emesteran SKPD		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		5 Dokum en		111.287. 000	Penda patan Asli Daerah (PAD)			7 Dok	45.000.0 00
5	3	1	2.		Administrasi barang milik daerah pada prangkat daerah						100%		35.146.0 00				100%	10.000.0 00
5	3	1	2.	6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		4 Dokum en		35.146.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)			1 Dok	10.000.0 00
5	3	1	2.		Administrasi kepegawaian perangkat daerah						100%		220.535. 350				100%	120.850. 000
5	3	1	2.	3	Pendataan dan pengolahan administrasi		Jumlah dokumen dan pendataan da pengolahan		Kab. Luwu Timur,		4 Lapora n		41.755.3 50	Penda patan Asli			1 Lap	15.000.0 00

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

					kepegawaian		administrasi kepegawaian		Malili, Puncak Indah					Daerah (PAD)				
5	3	1	2.05	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		7 Orang		66.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5 Orang	38.350.000
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		4 Orang		22.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4 Orang	37.500.000
5	3	1	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		10 Orang		89.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5 Orang	30.000.000
5	3	1	2.06		Administrasi umum prangkat daerah						95%		609.759.000				95%	372.500.000
5	3	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi Listrik/		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan		Kab. Luwu Timur,		13 paket		10.959.000	Pendapatan Asli			7 Jenis	13.000.000

					penerangan bangunan kantor		bangunan kantor		Malili, Punca k Indah					Daerah (PAD)				
5	3	1	2.	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		15 paket		25.368.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)			20 Unit	30.000.0 00
5	3	1	2.	4	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		31 paket		33.034.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)			20 Unit	10.000.0 00
5	3	1	2.	5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		4 paket		53.960.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)			3 Jenis	24.000.0 00
5	3	1	2.	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		2 Dokum en		5.100.00 0	Penda patan Asli Daerah (PAD)			48 Eksam plar	5.500.00 0

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5	3	1	2.06	8	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 laporan		60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			650 Orang	20.000.000
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 laporan		303.620.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140 Kali	250.000.000
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 Dokumen		12.271.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Dokumen	20.000.000
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%		303.046.048				100%	120.000.000
5	3	1	2.07	5	Pengadaan mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 Unit		11.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20 Unit	70.000.000
5	3	1	2.	6	Pengadaan		Jumlah unit		Kab.				34.260.0	Penda			5 Unit	50.000.0

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

			07		Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		8 Unit		00	patan Asli Daerah (PAD)			00
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%		217.300.500				100%	213.000.000
5	3	1	2.08	1	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 laporan		16.300.500	Penda patan Asli Daerah (PAD)		2.000 Surat	35.000.000
5	3	1	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 laporan		87.000.000	Penda patan Asli Daerah (PAD)		36 Rekening	52.000.000
5	3	1	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 laporan		114.000.000	Penda patan Asli Daerah (PAD)		8 Orang	126.000.000
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%		128.698.000				100%	133.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5	3	1	2.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		6 Unit		17.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2 Unit	35.000.000
5	3	1	2.	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		6 Unit		26.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4 Unit	13.000.000
5	3	1	2.	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		79 Unit		49.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55 Unit	35.000.000
5	3	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Kab. Luwu Timur, Malili,		1 Unit		34.818.000	Pendapatan Asli Daerah			1 Unit	50.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

						atau Bangunan Lainnya		yang dipelihara/direhabilitasi		Punca k Indah						(PAD)				
5	3	2				Program Kepegawaian Daerah					99%		2.767.016.650					100%	3.975.000.000	
5	3	2	2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					95%		721.279.650					95%	1.210.000.000	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dan PPPK		Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		1 Dokumen		74.140.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				1.620 Formasi	350.000.000	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		4 Dokumen		524.521.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				500 orang	550.000.000	
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		4 Dokumen		75.314.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				100 Perse n	135.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5	3	2	2.01	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		4 dokumen		47.304.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5 Aplikasi	50.000.000
5	3	2	2.01	1	Pengelolaan data kepegawaian		Persentase jumlah data pegawai yang dimutakhirkan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		-		-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100 persen	125.000.000
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN						95%		631.877.000				95%	750.000.000
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		4 Dokumen		161.925.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			84,89 Persen	150.000.000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN		Kab. Luwu Timur, Malili,		4 Dokumen		50.304.000	Pendapatan Asli Daerah			100 Persen	300.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

								Punca k Indah					(PAD)				
5	3	2	2. 02	3	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		1 Dokum en		419.648. 000	Penda patan Asli Daerah (PAD)			99 Perse n	300.000. 000
5	3	2	2. 03		Pengembangan Kompetensi ASN					95%		1.121.81 5.000				95%	1.670.00 0.000
5	3	2	2. 03	2	Pengelolaan Assesment Center		Jumlah dokumen pengelolaan Assessment center	Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		2 Dokum en		686.912. 000	Penda patan Asli Daerah (PAD)			95 Perse n	250.000. 000
5	3	2	2. 03	4	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan lanjutan	Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		5 Orang		360.342. 000	Penda patan Asli Daerah (PAD)			20 Orang	1.320.00 0.000
5	3	2	2. 03	1 4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Punca		500 orang		74.561.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)			90 Perse n	100.000. 000

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

						karir		k Indah										
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					95%			292.045.000				95%	345.000.000
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		4 Dokumen		75.197.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			100 Perse	100.000.000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		280 orang		78.990.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			100 Perse	90.000.000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		5 orang		62.271.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			100 Perse	10.000.000
5	3	2	2.04	9	Pelayanan proses izin perceraian pegawai		Jumlah dokumen proses izin perceraian Pegawai yang dilayani		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 Dokumen		16.248.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)			75 Perse	45.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

5	3	2	2.04	1	Evaluasi disiplin ASN		Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 Laporan		59.339.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100 Persen	100.000.000
5	3	3			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						50%		2.774.390.500				50%	2.109.097.000
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis						100%		1.310.485.000				100%	1.190.800.000
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		170 Orang		1.181.818.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			130 Orang	1.080.300.000
5	4	2	2.	4	Pembinaan,		Jumlah dokumen		Kab.		3		128.660.	Penda			3	110.500.

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

			01		Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		hasil Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		Dokumen		500	patan Asli Daerah (PAD)			Jenis	000
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					95%			1463.912.000				95%	918.297.000
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi,		Kab. Luwu Timur, Malili,		8 Dokumen		13.890.000	Pendapatan Asli Daerah			4 Jenis	30.000.000

					Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional yang disusun		Punca k Indah					(PAD)				
5	4	2	2. 02	3	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		-		-	Penda patan Asli Daerah (PAD)			2 Kali	100.000. 000
5	4	2	2. 02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,		Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan		Kab. Luwu Timur, Malili,		3 Lapora n		1.450.02 2.000	Penda patan Asli Daerah			100 Perse n	788.297. 000

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

				Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan		Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan		Punca k Indah						(PAD)				
TOTAL											10.706.9							11.176.9
											56.798							65.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur secara efektif dan efisien dengan memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD tahun 2025.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak begitupun dukungan dari segi penganggaran karena tanpa anggaran yang cukup tentunya akan ada beberapa kegiatan termasuk program nasional yang akan tertunda atau tidak dapat dilaksanakan yang berakibat tidak optimalnya capaian kinerja BKPSDM.

Dalam pelaksanaan Renja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025 tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan seperti hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu, masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta keberlanjutan dan konsistensi pembangunan.

Adapun rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025 yaitu dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu atau mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai amanat peraturan yang berlaku, melakukan evaluasi target kinerja dan anggaran tahun sebelumnya sebagai bahan selanjutnya, perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan profesional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Aamiin.

Malili, 05 September 2024

KEPALA BKPSDM,

Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 198602 2 004